

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

NAMA KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp 7.500.000,00
PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 7.500.000,00
KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp 0,00

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra, dan dilakukan review terhadap Renstra setiap terjadi perubahan kebijakan. Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto yang adaptif dan solutif terhadap permasalahan yang ada serta sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta evaluasi dan pelaporan.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode swakelola.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	7.500.000	7.430.000	99%	
2023	7.500.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	
2023	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen yaitu Rencana Awal Renja, Rencana Akhir Renja dan Rencana Kerja Perubahan
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada pohon kinerja.

- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 7.500.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan												
2	Pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

NAMA KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

PAGU ANGGARAN : Rp 7.500.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 7.500.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun Laporan Kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja dan tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

- Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode swakelola

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET	
2022	7.500.000	7.477.000	99%		
2023	7.500.000				
TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	
2023	Jumlah Dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen yaitu LKJIP, Laporan Kinerja Bulanan dan LPPD
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada pohon kinerja.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 7.500.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan												
2	Pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja												
3	Penyusunan dokumen LPPD												
4	Penyusunan dokumen LKJIP												
5	Penyusunan dokumen E.80 dan E.81												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

PAGU ANGGARAN : Rp 5.905.894.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 5.905.894.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka diperlukan sebuah sistem panatausahaan keuangan yang jelas, terukur dan sesuai prosedur, termasuk dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang merupakan hak setiap ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode swakelola.

L. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	5.148.138.000	4.631.874.819	89,9%	
2023	5.905.894.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100%	
2023	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan			

E. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN di BPBD Kabupaten Mojokerto.

F. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dengan target kinerja sebanyak 44 orang.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja dari segi peningkatan kualitas pelayanan internal.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

G. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 5.905.894.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN												

I. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

J. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR

PAGU ANGGARAN : Rp 65.000.000, -
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 65.000.000, -
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melengkapi sarana peralatan dan perlengkapan kantor dengan adanya pembangunan gedung pertemuan baru yang rencananya selesai di tahun anggaran 2023 maka perlu adanya sarana penunjang supaya Gedung tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagaimana mestinya guna menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan seperti kursi, meja, LCD proyektor , screen LCD, tab, personal computer, lemari arsip, kulkas showcase Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Guna penyediaan peralatan dan perlengkapan dimaksud maka metode pengadaan yang digunakan adalah e purchasing.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	163.414.453	158.418.700	96,94%	
2023	65.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	100%	
2023	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan, dengan target kinerja sebesar 4 paket, terdiri atas :
 - Mesin pemotong rumput , sejumlah 2 unit
 - kamera, sejumlah 1 unit
 - tablet, sebanyak 1 unit
 - PC / AIO , sebanyak 1 unit
 - Hardisk Eksternal, sebanyak 1 unit
- Output sub kegiatan ini telah diakomodir dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2023.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan internal.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 65.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah selama 4 (bulan) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut .:

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan dokumen pengadaan												
2	Pemilihan penyedia barang												
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor												
4	Pembayaran kegiatan pengadaan barang												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Secara garis besar rencana anggaran kegiatannya Sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

PAGU ANGGARAN : RP 45.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : RP 45.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kinerja maka diperlukan adanya penyediaan bahan logistik kantor dalam bentuk pengadaan makan, minum dan snack yang disediakan ketika harus melakukan rapat koordinasi internal ataupun stakeholder terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor dalam bentuk pengadaan makanan, minuman, snack pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor yaitu tersedianya pengadaan makanan, minuman dan snack pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja penyediaan bahan logistik kantor ini akan dilakukan dengan metode e puschasing.

H. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	75.000.000	74.887.000	99%	
2023	65.000.000	17.431.000	38%	Realisasi s.d Bulan April 2023

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	
2023	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket			

E. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor.

F. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target kinerja sebesar 1 paket.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

G. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp65.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor adalah selama 9 (bulan) bulan pada tahun anggaran 2023.

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan dokumen penyediaan												
2	Pengadaan bahan logistic kantor berupa penyediaan makanan, minuman dan snack												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana kegiatan anggarannya sebagaimana terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan logistic kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

PAGU ANGGARAN : Rp 32.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 32.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

A. LATAR BELAKANG

Pemenuhan atas kebutuhan beberapa barang cetak dan fotocopy merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan oleh sebuah unit kerja, untuk itu diperlukan adanya sebuah penganggaran khusus guna mencukupinya. Adapun barang yang dimaksud seperti pemenuhan atas map kertas berlogo identitas Dinas, fotocopy dokumen anggaran yang harus digandakan sedemikian rupa untuk dikirimkan ke beberapa bidang pengampu dilingkungan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu adanya cetak buku yang cetak buku peraturan yang berlaku terkait kebencanaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya barang cetakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSNAAN

Dalam rangka mencukupi belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini akan dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui penyedia yang ada.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	32.000.000	31.836.500	99%	
2023	32.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	
2023	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, dengan target kinerja sebesar 1 paket.terdiri dari map dinas, blangko SPPD dan foto copy
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 32.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023 adalah selama 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut .:

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Pengadaan barang cetak				■								
3	Penyediaan bahan penggandaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

J. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana kegiatannya Sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

PAGU ANGGARAN : Rp 42.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 42.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tentunya harus dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang berupa belanja material dalam bentuk pembelian alat tulis kantor, belanja kertas dan cover secara memadai untuk itu perlu kiranya untuk dianggarkan dalam sebuah sub kegiatan tertentu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya bahan alat tulis kantor, kertas / cover dan materai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kegiatan penyediaan bahan / material adalah terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor, kertas / cover pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten selama tahun 2023.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja penyediaan bahan bacaan ini akan dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui penyedia yang ada dan e purchasing.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	42.000.000	41.103.845	98%	
2023	42.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	
2023	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket			

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana kegiatan anggaran sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyediaan bahan material pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD

PAGU ANGGARAN : Rp 140.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 140.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kinerja maka tidak dipungkiri adanya kegiatan kegiatan yang sifatnya menghadiri undangan baik seremonial, koordinasi ataupun konsultatif dengan stakeholder terkait baik didalam daerah, dalam Propinsi Jawa Timur ataupun luar Propinsi Jawa Timur selama satu tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kebutuhan biaya transportasi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu terpenuhinya belanja perjalanan dinas pegawai untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja perjalanan dinas ini akan dilakukan dengan metode pengadaan langsung.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	190.000.000	189.850.880	99%	
2023	140.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	
2023	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya biaya perjalanan dinas keluar dan dalam daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target kinerja sebesar 180 laporan.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan internal.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 140.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan belanja perjalanan dinas												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK

PAGU ANGGARAN : Rp 120.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 120.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

A. LATAR BELAKANG

Fasilitasi penyediaan jasa komunikasi (telepon dan internet) dan listrik merupakan kebutuhan vital setiap organisasi perangkat daerah guna mendukung terlaksananya pencapaian tujuan organisasi, untuk itu maka diperlukan adanya dukungan anggaran guna mencukupi belanja dimaksud pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya penyediaan jasa langganan komunikasi (telepon dan internet) serta listrik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik akan dilakukan dengan metode swakelola melalui penyedia yang ada.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	200.000.000	182.707.952	91%	
2023	120.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	
2023	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan			

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM :PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

PAGU ANGGARAN : Rp 155.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp 155.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : 0

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kinerja maka tidak dipungkiri adanya kebutuhan pemberian honorarium bagi tenaga harian lepas atas jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga kebersihan, dan jasa tenaga administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium bagi petugas kebersihan, dan administrasi umum selama satu tahun anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini adalah terpenuhinya honorarium tenaga kebersihan, dan tenaga administrasi umum lainnya yang merupakan tenaga Non ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja perjalanan dinas ini akan dilakukan dengan metode swakelola.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	155.000.000	152.482.032	91%	
2023	155.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	
2023	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor untuk 5 orang tenaga harian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, yaitu :
 - 2 orang tenaga kebersihan
 - 6 orang tenaga administrasi
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan internal.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 155.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor												
2	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Umum												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

PAGU ANGGARAN : RP 200.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : RP 200.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) :

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

A. LATAR BELAKANG

Fasilitasi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diwujudkan dengan belanja kebutuhan BBM, ganti oli, pembayaran pajak kendaraan dan pembelian suku cadang pengganti kendaraan dinas operasional merupakan kebutuhan vital setiap organisasi perangkat daerah guna mendukung terlaksananya pencapaian tujuan organisasi, untuk itu maka diperlukan adanya dukungan anggaran guna mencukupi belanja dimaksud pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, yaitu

1. Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua dan Roda Empat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua dan Roda Empat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Pembayaran Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode swakelola melalui penyedia yang ada.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	225.000.000	224.479.955	99,77%	
2023	200.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit	100%	
2023	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada BADAN Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, dengan target kinerja sebesar 4 unit.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan internal.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 200.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. -

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 10 (sepuluh) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua dan Roda Empat												
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional Roda dua dan Roda Empat												
3.	Pembayaran Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operaional atau lapangan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PAGU ANGGARAN : Rp. 25.000.000,-
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp. 25.000.000,-
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) :

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Fasilitasi penyediaan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang diwujudkan dengan belanja merupakan kebutuhan vital setiap organisasi perangkat daerah guna mendukung terlaksananya pencapaian tujuan organisasi, untuk itu maka diperlukan adanya dukungan anggaran guna mencukupi belanja dimaksud pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto. Selain digunakan untuk belanja yang bersifat rutin untuk pemeliharaan Gedung seperti alat kebersihan maka ada rehabilitasi bangunan yang kiranya mutlak diperlukan pada tahun 2023 yaitu perlunya pengecatan kantor karena sudah 5 tahun tidak pernah dilakukan pengecatan gedung kantor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya penyediaan anggaran pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Gedung kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sehingga dapat menunjang keamanan, kebersihan dan kenyamanan kantor.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari sub kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu

1. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih guna pemeliharaan rutin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Belanja bahan baku bangunan dan jasa tukang guna rehabilitasi gedung kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode swakelola, pengadaan langsung dan e purchasing.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	225.000.000	224.132.000	99,61%	
2023	50.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	
2023	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sasaran sub kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi, dengan target kinerja sebesar 4 unit.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 25.000.000,00
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih												
2	Belanja bahan baku bangunan												
3	Belanja jasa tukang												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya adalah sebagaimana dokumen RKA terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA

PAGU ANGGARAN : Rp. 27.500.000,-
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp. 27.500.000,-
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) :

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**

A. LATAR BELAKANG

Fasilitasi penyediaan jasa pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang diwujudkan dengan belanja jasa servis Peralatan Gedung Kantor sehingga berfungsi baik merupakan kebutuhan vital setiap organisasi perangkat daerah guna mendukung terlaksananya pencapaian tujuan organisasi, untuk itu maka diperlukan adanya dukungan anggaran guna mencukupi belanja dimaksud pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor sehingga berfungsi baik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yaitu Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor berupa :

1. Belanja jasa pemeliharaan AC
2. Belanja jasa pemeliharaan Laptop/Komputer
3. Belanja jasa pemeliharaan Printer
4. Belanja jasa pemeliharaan Pompa Air

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode e purcasing.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	42.500.000	42.389.900	99,74%	
2023	27.500.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	26 unit	100%	
2023	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sasaran sub kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi, dengan target kinerja sebesar 26 unit.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 27.500.000,00
- DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. -

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeliharaan AC			■			■			■			
2	Pemeliharaan Laptop/ Komputer		■			■			■				
3	Pemeliharaan Printer		■			■			■				
4	Pemeliharaan Pompa			■			■			■			

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana RKA terlampir

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mojokerto

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PAGU ANGGARAN : Rp. 23.469.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp. 15.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : (-)

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas SDM dapat menambah kualitas dan mutu pelayanan pada OPD. Bimbingan teknis(bimtek) merupakan salah satu sarana peningkatan kualitas SDM. Bimbingan teknis pada tahun ini difokuskan untuk penerapan dan pendampingan pelaksanaan ISO 9001 di BPBD

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terlaksananya bimbingan teknis khususnya penerapan dan pendampingan ISO 9001
2. Meningkatkan kualitas layanan bencana dan kebakaran

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari sub ini yaitu pelaksanaan bimtek kepada SDM yang ada pada BPBD

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan metode e purcasing.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	0	0	0%	
2023	15.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	0	0	0	0%	
2023	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sasaran sub kegiatan adalah terselenggaranya bimtek pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja sebesar 20 orang.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 23.469.000,00
- DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. 10.000.000- (untuk pengadaan kaos bimtek)

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 4 (empat) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan pelaksanaan												
2	Penyelenggaraan bimtek												
3	evaluasi												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana RKA terlampir

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mojokerto

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PAGU ANGGARAN : Rp. 7.000.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp. 7.000.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : -

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. LATAR BELAKANG

Update informasi saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap orang dan sebagai seorang ASN maka harus memiliki cakrawala pandang yang lebih luas dan cepat dibandingkan masyarakat awan sehingga diperlukan adanya fasilitasi pembelian bahan bacaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya biaya langganan surat kabar / majalah dan pembelian buku bacaan/ peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah dan buku bacaan/ peraturan perundang-undangan

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan melalui penyedia yang ada.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	7.000.000	6.940.000	99%	
2023	7.000.000			

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2023	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen			

F. SASARAN

- a. Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- b. Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- c. Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- d. Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan pada BPBD Kabupaten Mojokerto

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan, dengan target kinerja sebesar 1 dokumen.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 7.000.000,00
- DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. 0-

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 4 (empat) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut berikut

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Langganan Surat Kabar/Koran/ majalah												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana RKA terlampir

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mojokerto

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto



RENCANA AKSI KEGIATAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

PAGU ANGGARAN : Rp. 11.500.000,00
SESUAI PROYEKSI

PAGU ANGGARAN : Rp. 11.500.000,00
SESUAI KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : -

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN

KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Guna kelancaran pelayanan umum yang ada di kantor BPBD sangat diperlukan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sehingga ketersediaan pasokan listrik sebagai sumber daya utama kantor tidak terdapat kendala

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan ini yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

D. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencukupi belanja sebagaimana dimaksud huruf C akan dilakukan dengan melalui e purchasing.

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	11.500.000	11.499.000	99%	
2023	11.500.000	1.270.000	11%	Realisasi s.d Bulan April 2023

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2022	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	
2023	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket			

F. SASARAN

- Sasaran strategis yang didukung adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran program yang didukung adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- Sasaran kegiatan yang didukung adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan pada BPBD Kabupaten Mojokerto

G. KELUARAN

- Keluaran / output sub kegiatan ini yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target kinerja sebesar 1 paket.
- Output sub kegiatan ini merupakan pendukung pencapaian peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada pohon kinerja, yaitu dari segi peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun hubungan antara output sub kegiatan dengan penjenjangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Sekretaris.

H. SUMBER PENDANAAN

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 11.500.000,00
- DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. 0-

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 4 (empat) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jadwal sebagai berikut berikut

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan komponen instalasi listrik												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Adapun rencana anggaran kegiatannya sebagaimana RKA terlampir

K. PENUTUP

Demikian Rencana aksi kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mojokerto

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar No 188 Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61365



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH.,M.Si

SATKER/SKPD : BPBD

NAMA PPTK : DJOKO SOEPANGKAT, S.Sos, MM.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA
PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp 250.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 250.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp -

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip good governance. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas

kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pencegahan bencana dan penanganan korban bencana

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota meliputi :

1. Pengadaan tenaga Pusdalops PB
2. pengadaan sarpras PB
3. monitoring
4. evaluasi

D. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengendalian operasi dilaksanakan tiap bulan berupa penyediaan tenaga PUSDALOPS beserta biaya operasionalnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sedangkan penyediaan sarpras kesiapsiagaan berupa gedek, trucuk, glangsing dan bronjong dilaksa

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	464.504.750	443.973.100	95,57%
2023	250.000.000		

F. Sasaran

- Desa rawan bencana

G. Keluaran

Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum :

Rp. 250.000.000

- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota Tahun 2023 adalah Januari-Desember 2023

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan tenaga Pusdalops PB												
2	Pengadaan sarpras PB												
3	Monitoring												
4	Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana Aksi Kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, Msi
Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar No 188 Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61365



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH.,M.Si

SATKER/SKPD : BPBD

NAMA PPTK : DJOKO SOEPANGKAT, S.Sos, MM.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC)
BENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp 150.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 150.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp -

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

RENCANA AKSI KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC)
BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip good governance. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

1	Rapat persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Monitoring												
4	Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana Aksi Kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, Msi
Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar No 188 Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61365



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH.,M.Si

SATKER/SKPD : BPBD

NAMA PPTK : DJOKO SOEPANGKAT, S.Sos, MM.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA

SUB KEGIATAN : RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp 225.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 225.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp -

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip good governance. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,

pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pencegahan bencana dan penanganan korban bencana

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Rapat Persiapan
2. Pelaksanaan
3. monitoring
4. evaluasi

D. Metode Pelaksanaan

kegiatan berupa supply air bersih dalam penanganan darurat bencana kekeringan bagi desa terdampak

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	225.000.000	.224.935.000	99,97%
2023	225.000.000		

F. Sasaran

- Desa Rawan Bencana

G. Keluaran

tersedianya penyediaan air bersih kepada desa terdampak bencana

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum :

Rp. 225.000.000

- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah Januari-Desember 2023

		BULAN
--	--	--------------

N O	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Monitoring												
4	Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana Aksi Kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar No 188 Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61365



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH.,M.Si

SATKER/SKPD : BPBD

NAMA PPTK : DJOKO SOEPANGKAT, S.Sos, MM.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA

SUB KEGIATAN : PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp 100.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 100.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp -

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip good governance. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pencegahan bencana dan penanganan korban bencana

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Rapat Persiapan
2. Pelaksanaan
3. monitoring
4. evaluasi

D. Metode Pelaksanaan

Kegiatan berupa penyediaan biaya operasional dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	100.000.000	98.905.000	98,9%
2023	100.000.000		

F. Sasaran

- Desa Rawan Bencana

G. Keluaran

Tersedianya biaya Operasional Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana pada keadaan tanggap darurat

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum :

Rp. 100.000.000

- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah Januari-Desember 2023

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat persiapan	■											
2	Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Monitoring												■
4	Evaluasi												■

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana Aksi Kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar No 188 Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61365



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH.,M.Si

SATKER/SKPD : BPBD

NAMA PPTK : DJOKO SOEPANGKAT, S.Sos, MM.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp 150.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 150.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG)

: Rp -

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip good governance. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan

penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pencegahan bencana dan penanganan korban bencana

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Rapat Persiapan
2. Pelaksanaan
3. monitoring
4. evaluasi

D. Metode Pelaksanaan

kegiatan berupa pengadaan logistik untuk korban bencana dan pemeliharaan sarana prasarana PB

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	150.000.000	139.953.900	93,30%
2023	128.890.636		

F. Sasaran

- Desa Terdampak Bencana

G. Keluaran

tersedianya bahan logistik atas suatu kejadian bencana

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum :

Rp. 150.000.000

- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp.

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah Januari-Desember 2023

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Monitoring												
4	Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana Aksi Kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, Msi
Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jalan Jayanegara No 16 Mojokerto, Telp (0321) 321255 Fax (0321) 328411



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : SYA'DILLAH, ST.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 332.000.000,-

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 332.000.000,-

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp 0,-

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA

L. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip *good governance*. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca

bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

M. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana

N. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Perencanaan/ rapat persiapan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring
4. Penyusunan Evaluasi dan Laporan dalam bentuk rintisan kerjasama

O. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota adalah kegiatan Penyusunan Kajian R3P/Dokumen Jitupasna dilaksanakan setelah adanya bencana, peningkatan kapasitas SDM Jitupasna dilaksanakan pada awal tahun anggaran sedangkan pengadaan bahan material bantuan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kegiatanpengadaan.

P. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	415.000.000,-	412.023.052,-	99,28%	
2023	331.450.264,-			

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : SYA'DILLAH, ST.

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000,-

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000,-

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp 0,-

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

W. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang organisasi perangkat daerah (reformasi birokrasi) dengan menerapkan prinsip *good governance*. Reformasi birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

5. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
6. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
7. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
8. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan bidang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa bencana dan kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

X. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana

Y. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi :

5. Perencanaan/ rapat persiapan
6. Pelaksanaan
7. Monitoring
8. Penyusunan Evaluasi dan Laporan dalam bentuk rintisan kerjasama

Z. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah Kegiatan berupa gladi yang dilaksanakan oleh BPBD, stakeholder dan masyarakat atas suatu kejadian bencana sehingga peran dari masing - masing pihak dapat diketahui dan dipraktekan secara langsung apabila ada kejadian bencana.

Å. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	KET
2022	100.000.000,-	99.062.000,-	99,06%	
2023	50.000.000,-			

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 100.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 100.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp. –

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

RENCANA AKSI KEGIATAN
SUB KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
KABUPATEN/KOTA

EE. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah kita dengar berita berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kabupaten Mojokerto memiliki keadaan alam yang sangat beragam dilihat dari segi topografi, geografi, geologi, dan iklim. Keadaan alam tersebut menjadi manifestasi sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki bentuk bentang alam dataran rendah dan mempunyai puluhan sungai, pegunungan, dan kemiringan lahan yang menimbulkan potensi terhadap bencana. Manifestasi bentang alam tersebut menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah yang sering dilanda bencana hidrometeorologis yaitu banjir, Banjir Bandang, Kekeringan dan Angin Kencang. Kejadian ini dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data DIBI BNPB yang diakses pada 19 Oktober 2022 Kabupaten Mojokerto didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari rentang waktu 2012-2022 dari 141 kejadian bencana 64 diantaranya adalah banjir dan 39 adalah puting beliung. Oleh karena itu perlunya dilakukan

Peningkatan Kapasitas SDM penanggulangan Bencana serta langkah-langkah mitigasi yang tepat guna mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam manajemen Penanggulangan bencana di kabupaten Mojokerto.
- b. Melakukan Mitigasi Bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.

FF. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

9. Persiapan/Perencanaan Pelatihan Kapasitas TRC
10. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan.
11. Evaluasi dan Penatausahaan Keuangan

12. Pemantauan dan Mitigasi Bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.

GG. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota adalah melalui metode swakelola yaitu dengan mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan narasumber dari Pusdiklat BNPB dan melakukan pemantauan mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.

HH. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	175.000.000	170.887.500	97,65%
2023	100,000,000		

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	- Jumlah SDM Penanggulangan Bencana yang dilatih	100 Orang	100 Orang	100%
	- Jumlah titik mitigasi Bencana	2 titik	2 titik	100 %
2023	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	-	-

II. Sasaran

- Sasaran strategis : Kapasitas penanggulangan bencana dalam urusan Pra Bencana yang terukur sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
- Sasaran program : Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana.
- Sasaran kegiatan : Persentase warga negara yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi.

MM. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

QQ. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN	: Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.
SATKER/SKPD	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NAMA PPTK	: Ir. SUMIYONO, M.Si
PROGRAM	: PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
KEGIATAN	: PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 186,169,000
PROYEKSI	
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 300.000.000
KEBUTUHAN	
LEBIH (KURANG)	: Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto saat ini cenderung dicirikan oleh terbatasnya ketersediaan dan daya tampung lahan untuk pembangunan akibat pertumbuhan dan distribusi penduduk yang pesat dan tidak merata serta kualitasnya tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat seiring dengan perluasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan berupa peningkatan jumlah pemukiman

dan kerapatan bangunan yang terkadang tidak terkontrol, sehingga terkadang menyebabkan bencana kebakaran. Wilayah Kabupaten yang merupakan tempat berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan kondisi padat pemukiman adalah kawasan yang sangat rawan terjadi bencana, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat dengan langkah-langkah penanggulangan bencana kebakaran. Upaya ini terdiri dari sebelum, pada saat dan setelah kebakaran terjadi. Oleh karena dalam Sub Kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota ini mendukung upaya-upaya pengendalian bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung operasional kegiatan Pemadam Kebakaran seperti BBM Mobil Damkar, Pemeliharaan Kendaraan Damkar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Mobil Pemadam kebakaran (Pengisian BBM Mobil Damkar).
2. Pemeliharaan kendaraan Mobil Damkar.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah melalui metode swakelola yaitu menjalin kerjasama dengan Bengkel dan SPBU yang ditunjuk dengan dasar MOU yang telah disetujui kedua belah pihak.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	6,074,366,067	5,996,959,050	98,73%
2023	186,169,000	54,876,500	29,48%

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	- Jumlah armada pemadam kebakaran yang layak operasional - Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani sesuai waktu tanggap	7 Unit 100 Kejadian	7 Unit 102 Kejadian	100% 102%
2023	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	-	-

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terlaksana Sesuai SOP dan Waktu Tanggap Yang ditentukan.
- Sasaran program : Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
- Sasaran kegiatan : Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
- Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Kebakaran Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018.

- Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejaran kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 186,169,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Mobil Pemadam kebakaran (Pengisian BBM Mobil Damkar)												
2	Pemeliharaan kendaraan Mobil Damkar												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM	: PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
SUB KEGIATAN	: PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 25.000.000
PROYEKSI	
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 25.000.000
KEBUTUHAN	
LEBIH (KURANG)	: Rp. –

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

RENCANA AKSI KEGIATAN

**SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN**

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto saat ini cenderung dicirikan oleh terbatasnya ketersediaan dan daya tampung lahan untuk pembangunan akibat pertumbuhan dan distribusi penduduk yang pesat dan tidak merata serta kualitasnya tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat seiring dengan perluasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan berupa peningkatan jumlah pemukiman

dan kerapatan bangunan yang terkadang tidak terkontrol, sehingga terkadang menyebabkan bencana kebakaran. Wilayah Kabupaten yang merupakan tempat berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan kondisi padat pemukiman

adalah kawasan yang sangat rawan terjadi kebakaran. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya pemukiman yang padat penduduk maka hal itu juga menambah risiko terjadinya kebakaran. Jenis daerah seperti ini menyulitkan mobilisasi mobil pemadam kebakaran, sehingga perlunya dibentuk relawan pemadam kebakaran di wilayah-wilayah yang padat penduduk serta daerah yang jauh dari jangkauan posko pemadam kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- b. Melakukan pembentukan dan pelatihan relawan pemadam kebakaran di wilayah-wilayah padat pemukiman dan wilayah yang jauh dari jangkauan posko pemadam kebakaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran meliputi :

1. Persiapan Pelaksanaan.
2. Pelaksanaan pembentukan dan pelatihan relawan pemadam kebakaran.
3. Monitoring dan Evaluasi.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran yaitu dengan melakukan pembentukan dan pelatihan relawan pemadam kebakaran bagi warga di desa yang wilayahnya masuk dalam kategori padat pemukiman dan jauh dari jangkauan posko pemadam kebakaran .

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	25,000,000	24,456,000	97,82%
2023*	25,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah organisasi relawan pemadam kebakaran wilayah yang dibentuk	4 Organisasi	1 Organisasi	25%
2023	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	1 Desa/Kelurahan	-	-

	pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			
--	---	--	--	--

F. Sasaran

- Sasaran strategis Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) melalui Pembentukan Organisasi Relawan Pemadam Kebakaran.
- Sasaran program : Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
- Sasaran kegiatan : Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
 - Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Kebakaran Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 25,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

		BULAN
--	--	--------------

N O	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Pelaksanaan												
2	Pelaksanaan pembentukan dan pelatihan relawan pemadam kebakaran												
3	Monitoring dan Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

KEGIATAN : PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN,
PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto saat ini cenderung dicirikan oleh terbatasnya ketersediaan dan daya tampung lahan untuk pembangunan akibat pertumbuhan dan distribusi penduduk yang pesat dan tidak merata serta kualitasnya tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat seiring dengan perluasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan berupa peningkatan jumlah pemukiman

dan kerapatan bangunan yang terkadang tidak terkontrol, sehingga terkadang menyebabkan bencana kebakaran. Wilayah Kabupaten yang merupakan tempat berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan kondisi padat pemukiman adalah kawasan yang sangat rawan terjadi bencana, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat dengan langkah-langkah penanggulangan bencana kebakaran. Upaya ini terdiri dari sebelum, pada saat dan setelah kebakaran terjadi. Oleh karena itu perlunya tenaga pemadam kebakaran yang kompeten dan terlatih serta bersertifikasi keahlian dalam mendukung upaya-upaya pengendalian bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- c. Menjadikan Tenaga Pemadam Kebakaran yang professional, handal dan kompeten bersertifikasi Nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran meliputi :

1. Persiapan Pelaksanaan.
2. Pemberangkatan dan Pelaksanaan pelatihan.
3. Monitoring dan Evaluasi.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran yaitu dengan memberangkatkan petugas pemadam kebakaran untuk mengikuti pelatihan Pemadam Kebakaran I di Pusdiklatkar Ciracas Prov. DKI. Jakarta.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	50,000,000	49,880,000	99,49%
2023	50,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang dibina	37 Orang	37 Orang	100%
2023	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	-	-

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terlaksana Sesuai SOP dan Waktu Tanggap Yang ditentukan dan Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran).
- Sasaran program : Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
- Sasaran kegiatan : Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Pelayanan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
 - Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Kebakaran Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 50,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Pelaksanaan												
2	Pemberangkatan dan Pelaksanaan pelatihan												
3	Monitoring dan Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 MojoanyarJawaTimur, KodePos 61365 Telp/Fax.(0321 – 325470)

Website : www.bpbdkabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

KEGIATAN : INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

SUB KEGIATAN : PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 25.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 25.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto saat ini cenderung dicirikan oleh terbatasnya ketersediaan dan daya tampung lahan untuk pembangunan akibat pertumbuhan dan distribusi penduduk yang pesat dan tidak merata serta kualitasnya tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat seiring dengan perluasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan berupa peningkatan jumlah pemukiman

dan kerapatan bangunan yang terkadang tidak terkontrol, sehingga terkadang menyebabkan bencana kebakaran. Wilayah Kabupaten yang merupakan tempat berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan kondisi padat pemukiman adalah kawasan yang sangat rawan terjadi kebakaran. Oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah pencegahan berupa inspeksi dan pemeriksaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang ada di fasilitas-fasilitas umum dan perusahaan yang berisiko tinggi terjadi kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah sebagai berikut :

- d. Melakukan pemeriksaan (inspeksi) sarana dan prasarana proteksi kebakaran di perusahaan dan fasilitas umum yang berisiko terjadi kebakaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meliputi :

1. Persiapan Pelaksanaan.
2. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
3. Monitoring dan Evaluasi.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yaitu dengan melakukan inspeksi pada perusahaan yang berisiko tinggi terjadi kebakaran dan fasilitas-fasilitas umum baik negeri maupun swasta.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
-------	--------------------	----------------	---------

2022	25,000,000	24,998,400	99,99%
2023	25,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah lembaga yang diinspeksi	20 Lembaga	20 Lembaga	100%
2023	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	-	-

F. Sasaran

- Sasaran strategis Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) melalui Lembaga yang diinspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran.
- Sasaran program : Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
- Sasaran kegiatan : Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Kebakaran Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejaran kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 25,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Pelaksanaan												
2	Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran												
3	Monitoring dan Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN	:	Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.
SATKER/SKPD	:	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NAMA PPTK	:	Ir. SUMIYONO, M.Si
PROGRAM	:	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
KEGIATAN	:	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI
PAGU ANGGARAN SESUAI	:	Rp. 900.000.000
PROYEKSI		
PAGU ANGGARAN SESUAI	:	Rp. 900.000.000
KEBUTUHAN		
LEBIH (KURANG)	:	Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto saat ini cenderung dicirikan oleh terbatasnya ketersediaan dan daya tampung lahan untuk pembangunan akibat pertumbuhan dan distribusi penduduk yang pesat dan tidak merata serta kualitasnya tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat seiring dengan perluasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan berupa peningkatan jumlah pemukiman

dan kerapatan bangunan yang terkadang tidak terkontrol, sehingga terkadang menyebabkan bencana kebakaran. Wilayah Kabupaten yang merupakan tempat berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan kondisi padat pemukiman adalah kawasan yang sangat rawan terjadi bencana, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat dengan langkah-langkah penanggulangan bencana kebakaran. Upaya ini terdiri dari sebelum, pada saat dan setelah kebakaran terjadi. Oleh karena itu perlunya didukung sarana prasarana yang dibutuhkan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan dari kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri adalah sebagai berikut :

- e. Mendukung operasional kegiatan Pemadam Kebakaran dengan pengadaan peralatan pemdaman kebakaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri meliputi :

1. Persiapan/Perencanaan.
2. Proses Pengadaan.
3. Proses Pertanggungjawaban/Penatausahaan Keuangan.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri adalah melalui metode Pengadaan Langsung menggunakan E-Katalog .

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	-	-	-
2023	100,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100%
2023	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	-	-

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terlaksana Sesuai SOP dan Waktu Tanggap Yang ditentukan dan Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran).
- Sasaran program : Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
- Sasaran kegiatan : Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran) dan Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap.
 - Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Kebakaran Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejaran kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 100,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. 800.000.000

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan/Perencanaan												
2	Proses Pengadaan												
3	Proses Pertanggungjawaban/Penatausahaan Keuangan												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah kita dengar berita berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kabupaten Mojokerto memiliki keadaan alam yang sangat beragam dilihat dari segi topografi, geografi, geologi, dan iklim. Keadaan alam tersebut menjadi manifestasi sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki bentuk bentang alam dataran rendah dan mempunyai puluhan sungai, pegunungan, dan kemiringan lahan yang menimbulkan potensi terhadap bencana. Manifestasi bentang alam tersebut menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah yang sering dilanda bencana hidrometeorologis yaitu banjir, Banjir Bandang, Kekeringan dan Angin Kencang. Kejadian ini dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data DIBI BNPB yang diakses pada 19 Oktober 2022 Kabupaten Mojokerto didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari rentang waktu 2012-2022 dari 141 kejadian bencana 64 diantaranya adalah banjir dan 39

adalah puting beliung. Timbulnya risiko-risiko bencana di atas membutuhkan langkah sistematis untuk dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin muncul. Upaya tersebut salah satunya dengan meningkatkan kapasitas yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana. Indeks Kapasitas Daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Kabupaten/Kota dalam mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Dokumen Indeks Kapasitas Daerah.
- b. Menghitung Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Perencanaan/rapat persiapan
2. Pelaksanaan FGD Penghitungan IKD
3. Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi hasil penghitungan IKD dan IRB.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah melalui metode swakelola dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) penghitungan IKD dan IRB.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	50,000,000	45,570,000	91,14%
2023	50,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah dokumen RAD PRB yang disusun Jumlah rapat koordinasi PB	1 Dokumen 2 Rakor	1 Dokumen 2 Rakor	100%
2023	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	-	-

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Terukurnya Indeks Kapasitas Daerah sesuai target yang ditentukan melalui Kegiatan Pengelolaan Resiko Bencana.
- Sasaran program : Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana
- Sasaran kegiatan : Persentase Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana yang tersusun dalam Indeks Kapasitas Daerah (IKD).
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana yang tersusun dalam Indeks Kapasitas Daerah (IKD) serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Indeks Kapasitas Daerah (IKD).
 - Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 50,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

N O	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan/ rapat persiapan												
2	Pelaksanaan FGD Penghitungan IKD												
3	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi hasil penghitungan IKD dan IRB												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 Mojoanyar Jawa Timur, Kode Pos 61365 Telp/Fax. (0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA

SUB KEGIATAN : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan
dan Kesiapsiagaan

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 100.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 100.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah kita dengar berita berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kabupaten Mojokerto memiliki keadaan alam yang sangat beragam dilihat dari segi topografi, geografi, geologi, dan iklim. Keadaan alam tersebut menjadi manivestasi sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki bentuk bentang alam dataran rendah dan mempunyai puluhan sungai, pegunungan, dan kemiringan lahan yang menimbulkan potensi terhadap bencana. Manivestasi bentang alam tersebut menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah yang sering dilanda bencana hidrometeorologhis yaitu banjir, Banjir Bandang, Kekeringan dan Angin Kencang. Kejadian ini dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data DIBI BNPB yang diakses pada 19 Oktober 2022 Kabupaten Mojokerto didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari rentang waktu 2012-2022 dari 141 kejadian bencana 64 diantaranya adalah banjir dan 39 adalah puting beliung. Timbulnya risiko-risiko bencana di atas membutuhkan langkah sistematis untuk dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin muncul. Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan Melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang berbasis Kawasan rawan bencana resiko tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas Wilayah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berbasis desa.
- b. Meningkatkan Kapasitas Wilayah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berbasis Lingkungan Pendidikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Perencanaan Penentuan lokasi Kawasan
2. Pelaksanaan Destana
3. Pelaksanaan SPAB
4. Evaluasi

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Wilayah dalam pencegahan dan kesiapsiagaana dalah melalui metode swakelola yaitu menjalin kerjasama dengan Fasilitator Kebencanaan yang telah bersertifikasi.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Wilayah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	200,000,000	189,960,050	94,98%
2023	101.620.200		

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Julam RS/Puskesmas yang dilatih Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk/dikembangkan Jumlah sekolah/madrasah yang dilatih	1 lembaga 2 Desa 1 lembaga	1 lembaga 2 Desa 1 lembaga	100%

1	Perencanaan Penentuan lokasi Kawasan												
2	Pelaksanaan Destana												
3	Pelaksanaan SPAB												
4	Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 MojoanyarJawaTimur, KodePos 61365 Telp/Fax.(0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA PPTK : Ir. SUMIYONO, M.Si

PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN : PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

SUB KEGIATAN : Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000

PROYEKSI

PAGU ANGGARAN SESUAI : Rp. 50.000.000

KEBUTUHAN

LEBIH (KURANG) : Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah kita dengar berita berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kabupaten Mojokerto memiliki keadaan alam yang sangat beragam dilihat dari segi topografi, geografi, geologi, dan iklim. Keadaan alam tersebut menjadi manivestasi sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki bentuk bentang alam dataran rendah dan mempunyai puluhan sungai, pegunungan, dan kemiringan lahan yang menimbulkan potensi terhadap bencana. Manivestasi bentang alam tersebut menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah yang sering dilanda bencana hidrometeorologhis yaitu banjir, Banjir Bandang, Kekeringan dan Angin Kencang. Kejadian ini dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data DIBI BNPB yang diakses pada 19 Oktober 2022 Kabupaten Mojokerto didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari rentang waktu 2012-2022 dari 141 kejadian bencana 64 diantaranya adalah banjir dan 39 adalah puting beliung. Timbulnya risiko-risiko bencana di atas membutuhkan langkah sistematis untuk dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin muncul. Upaya tersebut salah satunya dengan meningkatkan penguatan kelembagaan kebencanaan dan saling berkoordinasi seluruh instansi terkait kebencanaan dan stakeholder, serta mengoptimalkan peran relawan penanggulangan bencana dalam suatu wadah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang ada di Kabupaten Mojokerto.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Rapat Koordinasi seluruh Instansi terkait Penanggulangan bencana.
- b. Mengoptimalkan peran relawan penanggulangan bencana dalam suatu wadah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota meliputi :

1. Perencanaan/rapat persiapan
2. Pertemuan Rutin FPRB dan Instansi terkait penanggulangan bencana
3. Monitoring dan Evaluasi.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah melalui metode swakelola dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) FPRB dan Instansi terkait penanggulangan bencana.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	50,000,000	46,724,000	93,45%
2023	50,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah laporan kegiatan Forum PRB	2 Laporan	2 Laporan	100%
2023	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	-	-

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Tercapainya Indeks Kapasitas Daerah sesuai target melalui Kegiatan Forum PRB.
- Sasaran program : Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana
- Sasaran kegiatan : Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Indeks Kapasitas Daerah (IKD).
- Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 50,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

N O	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan/ rapat persiapan												
2	Pertemuan Rutin FPRB dan Instansi terkait penanggulangan bencana												
3	Monitoring dan Evaluasi												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 MojoanyarJawaTimur, KodePos 61365 Telp/Fax.(0321 – 325470)



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN	: Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.
SATKER/SKPD	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NAMA PPTK	: Ir. SUMIYONO, M.Si
PROGRAM	: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN	: PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 38.178.000
PROYEKSI	
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 150.000.000
KEBUTUHAN	
LEBIH (KURANG)	: Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah kita dengar berita berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kabupaten Mojokerto memiliki keadaan alam yang sangat beragam dilihat dari segi topografi, geografi, geologi, dan iklim. Keadaan alam tersebut menjadi manivestasi sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki bentuk bentang alam dataran rendah dan mempunyai puluhan sungai, pegunungan, dan kemiringan lahan yang menimbulkan potensi terhadap bencana. Manivestasi bentang alam tersebut menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah yang sering dilanda bencana hidrometeorologis yaitu banjir, Banjir Bandang, Kekeringan dan Angin Kencang. Kejadian ini dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data DIBI BNPB yang diakses pada 19 Oktober 2022 Kabupaten Mojokerto didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari rentang waktu 2012-2022 dari 141 kejadian bencana 64 diantaranya adalah banjir dan 39 adalah puting beliung. Timbulnya risiko-risiko bencana di atas membutuhkan langkah sistematis untuk dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin muncul. Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang bertujuan untuk menyelamatkan Individu warga negara di Kawasan rawan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana prasarana peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana berupa rehabilitasi perangkat *early warning system* (EWS).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi :

1. Perencanaan Lokasi
2. Pengkajian Lokasi

3. Pelaksanaan Proses Pengadaan
4. Pelaksanaan Pemasangan alat
5. Monitoring dan Evaluasi.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah melalui metode Pengadaan Langsung (PL) dengan Penyedia peralatan EWS.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	150,000,000	148.372.500	98,92%
2023	38.178.000		

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah sistem peringatan dini yang terpasang	1 Unit	1 Unit	100%
2023	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit		

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Peralatan Early Warning System (EWS) Bencana yang dapat berfungsi dengan optimal dan tepat sasaran.
- Sasaran program : Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana
- Sasaran kegiatan : Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Penanggulangan Bencana
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh pelayanan penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana

- Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejaran kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 38,178,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan Lokasi												
2	Pengkajian Lokasi												
3	Pelaksanaan Proses Pengadaan												
4	Pelaksanaan Pemasangan alat												
5	Monitoring dan Evaluasi.												

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon No 188 MojoanyarJawaTimur, KodePos 61365 Telp/Fax.(0321 – 325470)

Website : www.bpbd.kabmojokerto.go.id



RENCANA AKSI KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN	: Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, S.H., M.Si.
SATKER/SKPD	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NAMA PPTK	: Ir. SUMIYONO, M.Si
PROGRAM	: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN	: PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 50.000.000
PROYEKSI	
PAGU ANGGARAN SESUAI	: Rp. 50.000.000
KEBUTUHAN	
LEBIH (KURANG)	: Rp. –

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah kita dengar berita berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Kabupaten Mojokerto memiliki keadaan alam yang sangat beragam dilihat dari segi topografi, geografi, geologi, dan iklim. Keadaan alam tersebut menjadi manivestasi sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki bentuk bentang alam dataran rendah dan mempunyai puluhan sungai, pegunungan, dan kemiringan lahan yang menimbulkan potensi terhadap bencana. Manivestasi bentang alam tersebut menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah yang sering dilanda bencana hidrometeorologis yaitu banjir, Banjir Bandang, Kekeringan dan Angin Kencang. Kejadian ini dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data DIBI BNPB yang diakses pada 19 Oktober 2022 Kabupaten Mojokerto didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari rentang waktu 2012-2022 dari 141 kejadian bencana 64 diantaranya adalah banjir dan 39 adalah puting beliung. Oleh karena itu perlunya dilakukan penyebaran Informasi bencana melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pada daerah yang rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi pada daerah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarkan Informasi Bencana melalui berbagai Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada daerah rawan bencana melalui tatap muka, media cetak (Banner) dan melalui media aplikasi SIMONA (Sistem Informasi Mojokerto Bencana).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) meliputi :

1. Perancangan Update Aplikasi SIMONA.
2. Pelaksanaan Pekerjaan Updating SIMONA
3. Sosialisasi Informasi Bencana melalui aplikasi SIMONA pada daerah-daerah rawan bencana.

D. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) adalah melalui metode

swakelola yaitu menjalin kerjasama dengan Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat pada daerah rawan bencana.

E. Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja Tahun sebelumnya dari pelaksanaan sub kegiatan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) adalah sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	50,000,000	48,965,000	97,93%
2023	50,000,000	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah kegiatan KIE rawan bencana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
2023	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	15 Orang		

F. Sasaran

- Sasaran strategis : Inovasi Layanan urusan Pra Bencana yang terinternalisasi dan tersosialisasikan secara berkelanjutan.
- Sasaran program : Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana

- Sasaran kegiatan : Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana.
- Sasaran sub kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.

G. Keluaran

- Keluaran / output sub kegiatan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Keluaran/Output sub kegiatan ini mendukung pencapaian outcome kegiatan yaitu Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana serta pencapaian outcome program yaitu Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana dalam rangka pencapaian kinerja organisasi berupa Inovasi Layanan urusan Pra Bencana yang terinternalisasi dan tersosialisasikan secara berkelanjutan.
 - Output sub kegiatan ini juga mendukung (jika ada) :
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018.
 - Adapun hubungan antara keluaran/output sub kegiatan dengan penjejangan kinerja pada Matriks Pembagian Peran Hasil adalah keluaran/output sub kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja individu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

H. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Sub kegiatan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) adalah :

- [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Rp. 50,000,000
- [DANA KHUSUS] - Dana Insentif Daerah : Rp. –

I. Jangka Waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perancangan Update Aplikasi SIMONA												
2	Pelaksanaan Pekerjaan Updating SIMONA												

3	Sosialisasi Informasi Bencana melalui aplikasi SIMONA pada daerah-daerah rawan bencana														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

J. Rencana Kegiatan Anggaran

Adapun rencana kegiatan sebagaimana terlampir (format excel).

K. Penutup

Demikian Rencana aksi kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680207 198809 1 001

